



Katalog BPS : 7203005.34

STATISTIK KEUANGAN DAERAH
REGIONAL FINANCIAL STATISTICS

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta Province

2011 - 2012



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STATISTIK KEUANGAN DAERAH
REGIONAL FINANCIAL STATISTICS
PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
D.I.YOGYAKARTA PROVINCE
2011-2012

ISSN : 0126.4133

No. Katalog BPS/ *Catalog Number* : 7203005.34

No. Publikasi/ *Publication Number* : 34542.13.005

Jumlah Halaman / *Number of pages* : vii + 56 Halaman / *Pages*

Penyunting/ *Editor* :

1. Ir. Haryono, M.Si.
2. Santi Wijayanti, S.Si.

Naskah/ *Manuscript* :

Paulus Henri Laksono, SST

Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen

Financial and Producer Price Statistics Subdivision

Gambar Kulit/ *Cover Design*

Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen

Financial and Producer Price Statistics Subdivision

Diterbitkan oleh/ *Published by* :

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

BPS – Statistics of D.I. Yogyakarta Province

Boleh Dikutip dengan menyebut sumbernya.

May be cited with reference to the source.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2011-2012 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara teratur telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan data mengenai Realisasi APBD 2011 dan APBD 2012 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk perbaikan publikasi di masa mendatang, tanggapan dan saran-saran dari para pemakai sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Juni 2013

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
K e p a l a,

Ir. Wien Kusdiatmono, M.M
NIP. 19561120 197903 1 001

P R E F A C E

The publication of Regional Financial Statistics of Regional Government of D.I. Yogyakarta Province 2011-2012 is the continuation of previous publications published by BPS–Statistics of D.I. Yogyakarta Province. This book consists of data about The D.I. Yogyakarta Province and Regency/Municipality Regional Government’s actual revenues and expenditures.

We hope that this publication gives significant contributions to the Regional Financial of Regional Government information in D.I. Yogyakarta Province. Comments and suggestions to improve the contents of this publication are always be welcomed. We would like to express our sincere thanks to those who have contributed to make this publication was released.

*Yogyakarta, June 2013
BPS – Statistics of
Daerah Istimewa Yogyakarta Province
H e a d,*

*Ir. Wien Kusdiatmono, M.M
NIP. 19561120 197903 1 001*

DAFTAR ISI / *List of Contents*

KATA PENGANTAR / <i>PREFACE</i>	i
DAFTAR ISI / <i>List of Contents</i>	iii
I. PENJELASAN UMUM	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Ruang Lingkup.....	1
1.3. Konsep dan Definisi	2
II. ULASAN RINGKAS	6
Tabel-Tabel / <i>Tables</i>	
1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011	7
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011	10
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2012	10
4. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2007-2011.....	11
5. Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.....	13
6. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011	14
7. Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012.....	15
8. Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2007-2011	16

9.	Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011	17
10.	Jumlah dan Persentase Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012	17
11.	Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2007-2011	18
12.	Persentase Realisasi Belanja Menurut Jenisnya di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2011	19
13.	Persentase Rencana Belanja Menurut Jenisnya di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2012	20
1.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2012 / <i>Realization of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012</i> (000 Rp).	21
1.2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2012 / <i>Realization of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts, in 2011-2012</i> (000 Rp).....	22
1.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2012 / <i>Realization of D.I. Yogyakarta Province Government's Expenditures, in 2011-2012</i> (000 Rp).	23
1.4.	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012</i> (Persen/Percent).	24
1.5.	Persentase Pendapatan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts, in 2011-2012</i> (Persen/Percent).	25
1.6.	Persentase Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of D.I. Yogyakarta Province Government's Expenditures, in 2011-2012</i> (Persen/Percent).	26
2.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Kulonprogo</i>	

	<i>Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp).</i>	27
2.2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	28
2.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	29
2.4.	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	30
2.5.	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	31
2.6.	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	32
3.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	33
3.2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Bantul Regency Government's Receipts, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	34
3.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	35
3.4.	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	36
3.5.	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Bantul Regency Government's Receipts, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	37

3.6	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	38
4.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	39
4.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	40
4.3	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	41
4.4	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	42
4.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	43
4.6	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	44
5.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	45
5.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Sleman Regency Government's Receipts, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	46
5.3	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	47
5.4	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	48

5.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Sleman Regency Government's Receipts, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	49
5.6	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	50
6.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	51
6.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	52
6.3	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 / <i>Realization of Yogyakarta City Government's Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)</i>	53
6.4	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	54
6.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	55
6.6	Persentase Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 / <i>Percentage of Yogyakarta City Government's Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)</i>	56

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan serta menggali sumber-sumber potensi daerah. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu data statistik mengenai keuangan daerah menjadi semakin diperlukan dalam rangka keperluan kelengkapan informasi tentang keuangan negara, analisis dan pengambilan keputusan. Kegunaan data keuangan daerah antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi secara makro seperti pendapatan regional, tabel input output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.

I.2. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik keuangan daerah dibedakan antara lain :

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.

I.3. Konsep dan Definisi

I.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1. Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

1.2. Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi dalam tiga bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Contoh retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain. Contoh retribusi perijinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini terdiri dari Bagi

Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1. Bagi Hasil Pajak.

Bagi hasil pajak terdiri dari bagian penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak.

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.3. Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.4. Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah penerimaan dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

I.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Kelompok belanja tak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

II. ULASAN RINGKAS ANALISIS KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA BERDASAR REALISASI APBD 2011 DAN APBD 2012

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian wewenang ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumahtangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Dalam Tabel 1. dapat dilihat gambaran realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2011.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Ratio Pendapatan terhadap Belanja	Persentase Surplus/(Defisit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi D.I.Yogyakarta	1.604.724,64	1.562.268,73	1,03	2,65
Kab. Kulonprogo	791.826,64	780.620,06	1,01	1,42
Kab. Bantul	1.180.547,11	1.151.885,95	1,02	2,43
Kab. Gunungkidul	965.826,23	938.850,02	1,03	2,79
Kab. Sleman	1.311.436,53	1.278.166,68	1,03	2,54
Kota Yogyakarta	951.681,43	932.018,51	1,02	2,07

Dari tabel tersebut dapat kita amati, bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi D.I. Yogyakarta lebih dari satu atau mengalami surplus anggaran. Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2011 sudah dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah.

Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2011 memperoleh pendapatan/penerimaan sebesar 1,60 triliun rupiah dengan total pembelanjaan Pemerintah Provinsi mencapai besaran 1.562,27 milyar rupiah. Dengan demikian pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami surplus keuangan sekitar 2,65 persen.

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu mencapai nilai 1.311,44 milyar rupiah. Dengan belanja sebesar 1.278,17 milyar rupiah membuat kabupaten ini mengalami surplus anggaran sebesar 2,54 persen pada tahun 2011.

Realisasi pendapatan/penerimaan daerah kabupaten/kota tahun 2011 yang terendah diterima oleh Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 791,83 milyar rupiah. Pada tahun tersebut Kabupaten Kulonprogo menggunakan anggaran sebesar 780,62 milyar sehingga mengalami surplus sebesar 1,42 persen dari pendapatan yang diterima.

Sedangkan kabupaten yang mengalami persentase surplus terbesar pada tahun 2011 adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu mencapai 2,79 persen dari pendapatan yang diterima sebesar 965,83 milyar rupiah.

Salah satu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah sebagaimana uraian sebelumnya, adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu disamping sumber pembiayaan dari pemerintah di atasnya (berupa dana perimbangan) juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan perekonomian dan tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah.

Jenis-jenis pajak yang dikelola Pemerintah Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan jenis pajak yang dikelola pemerintah kabupaten/kota yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Sumbangan realisasi PAD Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2011 relatif besar mencapai 54,02 persen dari total pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Persentase PAD terhadap belanja daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk mencukupi belanja daerah sendiri. Besar persentase PAD terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta juga cukup besar. Lebih dari separuh (55,49 persen) dari belanja daerah pada tahun 2011 dapat dicukupi dengan PAD Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sedangkan sumbangan PAD masing-masing pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi D.I. Yogyakarta terhadap total pendapatan ataupun terhadap total belanja tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap
Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD thd Pendapatan	Persentase PAD thd Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi D.I. Yogyakarta	1.604.724,64	1.562.268,73	866.926,69	54,02	55,49
Kab. Kulonprogo	791.826,64	780.620,06	53.752,29	6,79	6,89
Kab. Bantul	1.180.547,11	1.151.885,95	128.896,46	10,92	11,19
Kab. Gunungkidul	965.826,23	938.850,02	54.462,42	5,64	5,80
Kab. Sleman	1.311.436,53	1.278.166,68	226.686,25	17,29	17,74
Kota Yogyakarta	951.681,43	932.018,51	228.870,56	24,05	24,56

Besaran sumbangan PAD terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2011 terlihat masih kecil. Dari lima kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, hanya ada tiga kabupaten/kota yang sumbangan PAD-nya diatas 10 persen, yakni Kota Yogyakarta dengan sumbangan PAD sebesar 24,05 persen, Kabupaten Sleman sebesar 17,29 persen dan Kabupaten Bantul sebesar 10,92 persen. Sedangkan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul sumbangan PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil (dibawah 10 persen).

Tabel 3
Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rupiah)	Rencana Belanja (Juta Rupiah)	Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD thd Pendapatan	Persentase PAD thd Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi D.I. Yogyakarta	1.935.447,75	2.124.288,71	800,156,498	41.34	37.67
Kab. Kulonprogo	800.878,04	834.118,06	54,293,141	6.78	6.51
Kab. Bantul	1.195.345,04	1.198.030,65	121,593,862	10.17	10.15
Kab. Gunungkidul	1.010.100,10	1.075.636,62	55,600,362	5.50	5.17
Kab. Sleman	1.383.011,98	1.439.946,41	220,367,231	15.93	15.30
Kota Yogyakarta	899.626,13	902.295,61	241,190,745	26.81	26.73

Upaya peningkatan PAD oleh pemerintah daerah belum tercermin pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012, dimana persentase PAD terhadap pendapatan tahun tersebut sebagian besar kabupaten/kota masih dibawah persentase tahun 2011. Hanya Kota Yogyakarta yang menargetkan proporsi PAD yang lebih tinggi yaitu dari 24,05 persen di tahun 2011 menjadi 26,81 persen pada tahun 2012.

Dalam 5 tahun terakhir upaya peningkatan PAD di masing-masing pemerintah daerah terlihat pada tabel 4. Secara umum terlihat ada peningkatan persentase PAD terhadap pendapatan daerahnya, bahkan untuk Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta sudah lebih dari separuh anggaran pendapatan daerahnya sudah terpenuhi dari PAD, dari yang hanya 37,41 persen di tahun 2007, sekarang sudah bisa mencapai 54,02 persen. Demikian pula untuk Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul juga relatif mengalami peningkatan persentase PAD, meskipun besaran persentasenya masih tidak sebesar Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tabel 4
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan
Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2007 - 2011

Pemerintah Daerah	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi D.I. Yogyakarta	37,41	41,73	50,16	53,86	54,02
Kab. Kulonprogo	7,44	7,27	6,60	7,63	6,79
Kab. Bantul	7,86	6,82	10,05	8,27	10,92
Kab. Gunungkidul	4,79	4,78	5,40	5,33	5,64
Kab. Sleman	14,63	14,86	15,78	14,88	17,29
Kota Yogyakarta	18,54	18,39	21,53	22,00	24,05

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah, adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun dalam rangka ekstensifikasi khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan investasi daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah selain dari PAD juga berasal dari Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil bukan pajak bersumber dari sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi). Dasar perolehan dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 5.

Sumber pendapatan lain yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dua puluh enam persen (26 persen) dari penerimaan APBN (penerimaan dari minyak dan gas, penerimaan pajak serta penerimaan dari non-migas dan non-pajak)

dialokasikan untuk DAU. Sepuluh persen (10 persen) DAU dibagi ke provinsi, dan sembilan puluh persen (90 persen) dibagi ke kabupaten/kota.

Tabel 5
Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah menurut
Undang-undang nomor 33 Tahun 2004

Jenis Pungutan	Pemerintah (Persen)	Provinsi Bersangkutan (Persen)	Kabupaten /kota Penghasil (Persen)	Kabupaten /Kota Lain dan Provinsi Bersangkutan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PBB ¹⁾	10,0	16,2	64,8	0,0
2. BPHTB	20,0	16,0	64,0	0,0
3. PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21	80,0	8,0	12,0	0,0
4. Kehutanan				
a. IHPH/IHH	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Provisi Sumber Daya Hutan	20,0	16,0	32,0	32,0
c. Reboisasi	60,0	0,0	40,0	0,0
5. Pertambangan Umum				
a. Land-Rent (Iuran Tetap)	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Royalty iuran Eksplorasi	20,0	16,0	32,0	32,0
6. Perikanan ²⁾	20,0	0,0	0,0	0,0
7. Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2
8. Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2
9. Panas Bumi	20,0	16,0	32,0	32,0

Catatan : ¹⁾ 9 % untuk biaya pemungutan

²⁾ 80% untuk seluruh kabupaten/kota

Alokasi DAU tergantung dari bobot (tolok ukur) daerah. Penentuan Tolok Ukur (Bobot) didasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, sumber daya alam (SDA),

sumber daya manusia (SDM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi tolok ukur penentuan DAU.

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pusat tentang keuangan daerah diharapkan semakin kecil (sumbangan DAU kecil), atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri (sumbangan PAD besar).

Tabel 6
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap
Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU thd Pendapatan	Persentase DAU thd Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi D.I. Yogyakarta	1.604.724,64	1.562.268,73	620.812,33	38,69	39,74
Kab. Kulonprogo	791.826,64	780.620,06	444.043,86	56,08	56,88
Kab. Bantul	1.180.547,11	1.151.885,95	625.060,83	52,95	54,26
Kab. Gunungkidul	965.826,23	938.850,02	572.008,92	59,22	60,93
Kab. Sleman	1.311.436,53	1.278.166,68	631.920,73	48,19	49,44
Kota Yogyakarta	951.681,43	932.018,51	436.129,82	45,83	46,79

Pada tahun 2011 besarnya DAU yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 620,81 milyar rupiah atau mencapai 38,69 persen dari pendapatan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. Besaran ini mampu mencukupi 39,74 persen dari belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2011.

Sampai tahun ke-11 diberlakukannya otonomi daerah, sumbangan DAU bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta masih besar. Antara 46-59 persen pendapatan pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta diperoleh dari DAU, sementara di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012 sektor ini malah meningkat persentasenya, yaitu antara 60-66 persen. Dengan kondisi seperti itu, tentunya pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta sekali lagi masih perlu meningkatkan PAD nya agar ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam hal keuangan bisa diminimalkan demi terselenggaranya otonomi daerah yang nyata.

Tabel 7
Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rupiah)	Rencana Belanja (Juta Rupiah)	Rencana Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU thd Pendapatan	Persentase DAU thd Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi D.I. Yogyakarta	1.935.447,75	2.124.288,71	757.056,70	39,12	35,64
Kab. Kulonprogo	800.878,04	834.118,06	531.104,02	66,32	63,67
Kab. Bantul	1.195.345,04	1.198.030,65	768.034,58	64,25	64,11
Kab. Gunungkidul	1.010.100,10	1.075.636,62	687.944,49	68,11	63,96
Kab. Sleman	1.311.436,53	1.439.946,41	795.708,77	60,67	55,26
Kota Yogyakarta	899.626,13	902.295,61	536.466,61	59,63	59,46

Realisasi DAU dalam 5 tahun terakhir peranannya terus menurun terhadap pendapatan daerah. Dari kisaran 59 - 72 persen pada tahun 2007, menjadi 46-59 persen pada tahun 2011 untuk pemerintah kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta persentase DAU terhadap pendapatan daerah pada lima tahun terakhir ini tidak banyak berubah yaitu antara 30-40 persen.

Tabel 8
Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
di Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2007 - 2011

Pemerintah Daerah	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi D.I. Yogyakarta	33,47	40,66	40,74	38,38	38,69
Kab. Kulonprogo	72,31	69,36	69,26	64,97	56,08
Kab. Bantul	72,03	56,97	64,45	58,11	52,95
Kab. Gunungkidul	76,31	73,29	71,38	65,30	59,22
Kab. Sleman	65,83	62,61	59,01	51,42	48,19
Kota Yogyakarta	59,29	57,10	55,25	48,49	45,83

Dalam format lama, belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah mulai tahun 2007 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya selama tahun 2011 menghabiskan dana 961,36 milyar rupiah (61,54 persen dari total belanja) untuk belanja tidak langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan.

Secara umum persentase pos pembelanjaan daerah pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta tahun 2011 sebagian besar masih digunakan untuk pos Belanja Tidak Langsung.

Tabel 9
Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2011

Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja	Belanja Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi D.I. Yogyakarta	961,364.91	61,54	600,903.82	38,46
Kab. Kulonprogo	540,214.64	69,20	240,405.42	30,80
Kab. Bantul	817,126.90	70,94	334,759.05	29,06
Kab. Gunungkidul	687,031.57	73,18	251,818.45	26,82
Kab. Sleman	883,296.14	69,11	394,870.54	30,89
Kota Yogyakarta	608,011.25	65,24	324,007.27	34,76

Demikian pula pada tahun 2012 belum ada rencana penurunan yang signifikan pada persentase belanja tidak langsung rencana anggaran tahun 2012. Selain Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta, persentase belanja tidak langsungnya bahkan semakin naik dibanding tahun 2011.

Tabel 10
Jumlah dan Persentase Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2012

Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja	Belanja Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi D.I. Yogyakarta	1,267,028.06	59,64	857,260.64	40,36
Kab. Kulonprogo	586,928.56	70,37	247,189.50	29,63
Kab. Bantul	880,309.45	73,48	317,721.20	26,52
Kab. Gunungkidul	747,060.82	69,45	328,575.81	30,55
Kab. Sleman	1,032,856.50	71,73	407,089.92	28,27
Kota Yogyakarta	537,766.50	59,60	364,529.12	40,40

Tabel 11
Persentase Belanja Tidak Langsung
terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
di Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2007 - 2011

Pemerintah Daerah	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi D.I. Yogyakarta	60,13	63,01	52,50	58,21	61,54
Kab. Kulonprogo	59,54	64,03	76,98	77,33	69,20
Kab. Bantul	66,71	57,22	70,25	71,62	70,94
Kab. Gunungkidul	59,56	62,63	72,03	81,10	73,18
Kab. Sleman	63,97	66,08	66,17	69,13	69,11
Kota Yogyakarta	57,10	59,45	60,54	63,75	65,24

Jika kita cermati persentase belanja tidak langsung dalam 5 tahun terakhir, terlihat bahwa belum adanya penurunan pada pos ini, bahkan ada kecenderungan persentasenya terus meningkat dan dominan terhadap belanja daerah. Hal ini terjadi baik di Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta maupun pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini.

Dilihat dari realisasi belanja menurut jenis belanjanya, Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta paling banyak membelanjakan anggarannya di sektor pendidikan. Hal ini bisa terlihat dari persentase belanja di sektor pendidikan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya, bahkan Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul lebih dari separuh belanjanya untuk sektor pendidikan. Sektor berikutnya yang cukup besar persentasenya adalah sektor pelayanan umum dan sektor kesehatan.

Berbeda dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta banyak membelanjakan anggarannya di sektor pelayanan umum, yaitu mencapai 52,51 persen dari total belanja. Diikuti sektor ekonomi, perumahan/fasilitas umum dan pendidikan masing-masing sebesar 15,93 persen, 12,45 persen dan 9,17 persen.

Tabel 12
Persentase Realisasi Belanja Menurut Jenisnya
di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011

Jenis Belanja	Provinsi D.I. Yogyakarta	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	52,51	17,92	18,75	20,24	24,43	28,35
2. Ketertiban dan Keamanan	1,08	0,62	0,64	0,75	1,41	0,20
3. Ekonomi	15,93	7,08	4,77	6,35	8,09	4,28
4. Lingkungan Hidup	0,58	1,10	0,30	0,35	2,78	3,08
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	12,45	9,09	8,70	3,33	15,64	5,87
6. Kesehatan	3,79	11,57	12,57	10,04	16,45	12,05
7. Pariwisata dan Budaya	2,14	0,57	0,48	0,44	0,83	0,60
8. Pendidikan	9,17	51,52	53,53	55,74	28,02	43,79
9. Perlindungan Sosial	2,35	0,53	0,26	2,46	2,34	1,77
10. Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rencana prioritas belanja pada tahun anggaran 2012 tidak banyak berubah dibanding tahun 2011. Hal ini terlihat dari besarnya persentase masing-masing sektor belanja yang tidak jauh berbeda dibanding realisasi anggaran tahun sebelumnya. Pada rencana anggaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi D.I. Yogyakarta, sektor pendidikan, pelayanan umum dan kesehatan masih mendapatkan porsi belanja yang lebih besar dibanding sektor lainnya. Sedangkan pada Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta porsi belanja yang lebih besar masih pada sektor pelayanan umum, ekonomi dan pendidikan

Tabel 13
Persentase Rencana Belanja Menurut Jenisnya
di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012

Jenis Belanja	Provinsi D.I. Yogyakarta	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	59,58	17,97	19,08	16,46	31,82	25,12
2. Ketertiban dan Keamanan	1,22	0,63	0,55	0,73	1,75	1,69
3. Ekonomi	10,57	7,46	5,82	7,50	8,51	6,57
4. Lingkungan Hidup	0,62	0,70	0,33	1,32	2,56	3,60
6. Perumahan dan Fasilitas Umum	8,74	10,45	7,47	5,45	16,15	10,48
6. Kesehatan	6,03	11,19	12,94	9,10	20,69	14,78
7. Pariwisata dan Budaya	2,30	0,49	0,55	0,53	1,38	0,80
8. Pendidikan	9,24	50,63	52,95	57,72	15,07	36,72
9. Perlindungan Sosial	1,72	0,49	0,31	1,19	2,07	0,23
10. Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL-TABEL

<http://yogyakarta.ac.id>

**Tabel/Table 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi
D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2012 / Realization of D.I. Yogyakarta
Province Government's Receipts and Expenditures, 2011-2012
(000 Rp)**

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	1.604.724.637	1.935.447.748
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	866.926.690	800.156.498
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	722.339.654	850.513.085
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	15.458.293	284.778.165
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	1.562.268.732	2.124.288.708
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	961.364.910	1.267.028.063
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	600.903.822	857.260.645
	Surplus / (Defisit)	42.455.905	(188.840.960)
	Pembiayaan Netto / Cost	0	188.840.961

*) Data APBD

Tabel/Table 1.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2012 / Realization of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts, in 2011-2012

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	866.926.690	800.156.498
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	735.226.106	689.572.065
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	35.799.463	36.228.288
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	28.961.383	31.863.499
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	66.939.738	42.492.646
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	722.339.654	850.513.085
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	82.037.726	74.403.649
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	620.812.328	757.056.696
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	19.489.600	19.052.740
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	15.458.293	284.778.165
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	1.604.724.637	1.935.447.748

*) Data APBD

Tabel/Table 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2012 / Realization of D.I. Yogyakarta Province Government's Expenditures, in 2011-2012
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	961.364.910	1.267.028.063
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	414.966.135	490.659.484
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0	0
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	17.578.562	355.793.657
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	114.820.604	94.674.768
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa/ Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	268.047.340	251.788.474
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	145.929.020	54.111.680
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	23.249	20.000.000
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	600.903.822	857.260.645
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	86.317.287	111.508.041
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	372.175.026	527.793.940
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	142.411.509	217.958.664
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	1.562.268.732	2.124.288.708

*) Data APBD

Tabel/Table 1.4 **Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2012 / Percentage of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / <i>Local Original Receipts</i>	54,02	41,34
1.2	Dana Perimbangan / <i>Balancing Funds</i>	45,01	43,94
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / <i>Other Receipts</i>	0,96	14,71
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / <i>Indirect Expenditures</i>	61,54	59,64
2.2	Belanja Langsung / <i>Direct Expenditures</i>	38,46	40,36

*) Data APBD

Tabel/Table 1.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2012 / Percentage of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts, in 2011-2012 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	54,02	41,34
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	45,82	35,63
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	2,23	1,87
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	1,80	1,65
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	4,17	2,20
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	45,01	43,94
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	5,11	3,84
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	38,69	39,12
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	1,21	0,98
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	0,96	14,71
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 1.6 Persentase Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2012 / Percentage of D.I. Yogyakarta Province Government's Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	61,54	59,64
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	26,56	23,10
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	1,13	16,75
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	7,35	4,46
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	17,16	11,85
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	9,34	2,55
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	0,00	0,94
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	38,46	40,36
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	5,53	5,25
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	23,82	24,85
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	9,12	10,26
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2012 / Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	791.826.638	800.878.039
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	53.752.293	54.293.141
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	522.276.920	605.036.391
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	215.797.424	141.548.507
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	780.620.062	834.118.055
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	540.214.640	586.928.558
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	240.405.423	247.189.497
	Surplus / (Defisit)	11.206.576	(33.240.016)
	Pembiayaan Netto / Cost	59.563.401	33.240.016

*) Data APBD

Tabel/Table 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2012 / Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2011-2012
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	53.752.293	54.293.141
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	5.853.809	6.333.326
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	8.450.599	9.902.587
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	4.936.479	6.228.952
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	34.511.406	31.828.277
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	522.276.920	605.036.391
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	29.896.555	28.552.855
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	444.043.865	531.104.016
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	48.336.500	45.379.520
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	215.797.424	141.548.507
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	791.826.638	800.878.039

*) Data APBD

Tabel/Table 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2012 / Realization of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2011-2012
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	540.214.640	586.928.558
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	486.501.097	527.297.268
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	51.692	46.412
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0	100.000
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	16.840.952	4.425.500
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	11.346.585	9.508.000
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	1.872.890	2.251.863
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.</i>	22.518.467	27.150.896
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	1.082.957	16.148.619
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	240.405.423	247.189.497
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	34.107.817	30.580.016
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	100.692.719	77.923.227
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	105.604.887	138.686.254
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	780.620.062	834.118.055

*) Data APBD

Tabel/Table 2.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2012 / Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	6,79	6,78
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	65,96	75,55
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	27,25	17,67
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	69,20	70,37
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	30,80	29,63

*) Data APBD

Tabel/Table 2.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2012 / Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2011-2012 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	6,79	6,78
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	0,74	0,79
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	1,07	1,24
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,62	0,78
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	4,36	3,97
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	65,96	75,55
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	3,78	3,57
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	56,08	66,32
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	6,10	5,67
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	27,25	17,67
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 2.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2012 / Percentage of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	69,20	70,37
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	62,32	63,22
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0,01	0,01
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0,00	0,01
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	2,16	0,53
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	1,45	1,14
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0,24	0,27
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	2,88	3,26
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0,14	1,94
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	30,80	29,63
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	4,37	3,67
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	12,90	9,34
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	13,53	16,63
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 / Realization of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	1.180.547.112	1,195.345.041
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	128.896.456	121.593.862
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	717.123.250	868.175.052
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	334.527.406	205.576.127
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	1.151.885.952	1.198.030.646
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	817.126.902	880.309.449
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	334.759.050	317.721.197
	Surplus / (Defisit)	28.661.160	(2.685.605)
	Pembiayaan Netto / Cost	30.992.516	2.685.605

*) Data APBD

Tabel/Table 3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 / Realization of Bantul Regency Government's Receipts, in 2011-2012

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	128.896.456	121.593.862
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	35.068.592	32.090.347
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	17.798.604	21.512.622
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	7.290.930	7.753.664
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	68.738.330	60.237.229
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	717.123.250	868.175.052
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	46.143.223	36.859.018
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	625.060.827	768.034.584
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	45.919.200	63.281.450
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	334.527.406	205.576.127
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	1.180.547.112	1.195.345.041

*) Data APBD

**Tabel/Table 3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 /
Realization of Bantul Regency Government's Expenditures,
in 2011-2012**

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	817.126.902	880.309.449
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	723.599.430	802.223.164
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	51.507	120.145
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	23.888.752	19.704.352
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	36.168.122	9.278.080
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	1.906.275	1.949.183
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	30.446.501	43.475.171
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	1.066.315	3.559.354
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	334.759.050	317.721.197
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	65.296.560	61.263.526
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	150.045.460	129.364.033
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	119.417.030	127.093.638
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	1.151.885.952	1.198.030.646

*) Data APBD

Tabel/Table 3.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 / Percentage of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	10,92	10,17
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	60,74	72,63
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	28,34	17,20
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	70,94	73,48
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	29,06	26,52

*) Data APBD

Tabel/Table 3.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 / Percentage of Bantul Regency Government's Receipts, in 2011-2012

(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	10,92	10,17
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	2,97	2,68
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	1,51	1,80
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,62	0,65
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	5,82	5,04
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	60,74	72,63
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	3,91	3,08
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	52,95	64,25
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	3,89	5,29
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	28,34	17,20
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 3.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 / Percentage of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2011-2012
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	70,94	73,48
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	62,82	66,96
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0,00	0,01
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	2,07	1,64
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	3,14	0,77
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0,17	0,16
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	2,64	3,63
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0,09	0,30
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	29,06	26,52
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	5,67	5,11
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	13,03	10,80
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	10,37	10,61
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

**Tabel/Table 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2011-2012 / Realization of Gunungkidul Regency
Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012
(000 Rp)**

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	965.826.233	1.010.100.099
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	54.462.419	55.600.362
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	667.004.719	787.156.404
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	244.359.095	167.343.333
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	938.850.018	1.075.636.625
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	687.031.570	747.060.818
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	251.818.448	328.575.807
	Surplus / (Defisit)	26.976.215	(65.536.526)
	Pembiayaan Netto / Cost	87.214.093	65.536.526

*) Data APBD

Tabel/Table 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2012 / Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2011-2012
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	54.462.419	55.600.362
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	8.129.852	8.328.000
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	11.384.305	17.231.674
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	4.259.233	4.760.476
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	30.689.029	25.280.212
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	667.004.719	787.156.404
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	35.839.003	28.627.495
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	572.008.916	687.944.489
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	59.156.800	70.584.420
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	244.359.095	167.343.333
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	965.826.233	1.010.100.099

*) Data APBD

Tabel/Table 4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2012 / Realization of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2011-2012
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	687.031.570	747.060.818
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	615.375.146	675.778.408
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	43.354	35.500
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0	0
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	9.387.373	3.835.785
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	16.454.187	14.627.692
1.6	Belanja bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.</i>	3.180.539	3.447.083
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	41.797.142	46.086.349
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	793.830	3.250.000
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	251.818.448	328.575.807
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	36.051.916	33.967.722
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	104.745.058	104.299.998
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	111.021.474	190.308.088
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	938.850.018	1.075.636.625

*) Data APBD

Tabel/Table 4.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2012 / Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	5,64	5,50
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	69,06	77,93
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	25,30	16,57
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	73,18	69,45
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	26,82	30,55

*) Data APBD

Tabel/Table 4.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2012 / Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2011-2012 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	5,64	5,50
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	0,84	0,82
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	1,18	1,71
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,44	0,47
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	3,18	2,50
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	69,06	77,93
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	3,71	2,83
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	59,22	68,11
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	6,12	6,99
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	25,30	16,57
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 4.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2012 / Percentage of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	73,18	69,45
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	65,55	62,83
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	1,00	0,36
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	1,75	1,36
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	0,34	0,32
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	4,45	4,28
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	0,08	0,30
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	26,82	30,55
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	3,84	3,16
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	11,16	9,70
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	11,83	17,69
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2012 / Realization of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	1.311.436.527	1.383.011.983
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	226.686.250	220.367.231
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	753.889.010	917.372.329
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	330.861.267	245.272.422
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	1.278.166.681	1.439.946.413
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	883.296.136	1.032.856.496
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	394.870.545	407.089.917
	Surplus / (Defisit)	33.269.846	(56.934.430)
	Pembiayaan Netto / Cost	105.276.125	56.934.430

*) Data APBD

Tabel/Table 5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2012 / Realization of Sleman Regency Government's Receipts, in 2011-2012 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	226.686.250	220.367.231
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	142.698.407	132.330.000
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	33.163.698	32.199.504
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	11.036.188	11.659.155
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	39.787.957	44.178.572
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	753.889.010	917.372.329
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	79.317.977	69.426.172
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	631.920.733	795.708.767
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	42.650.300	52.237.390
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	330.861.267	245.272.422
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	1.311.436.527	1.383.011.983

*) Data APBD

Tabel/Table 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2012 / Realization of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2011-2012

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	883.296.136	1.032.856.496
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	776.376.372	897.126.904
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	61.571	144.000
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	36.819.420	29.433.803
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	30.102.115	58.123.541
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	19.693.062	22.498.271
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	19.754.373	21.922.735
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	489.223	3.607.242
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	394.870.545	407.089.917
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	84.196.305	76.574.718
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	214.562.841	199.840.724
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	96.111.399	130.674.475
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	1.278.166.681	1.439.946.413

*) Data APBD

Tabel/Table 5.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2012 / Percentage of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	17,29	15,93
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	57,49	66,33
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	25,23	17,73
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	69,11	71,73
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	30,89	28,27

*) Data APBD

Tabel/Table 5.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2012 / Percentage of Sleman Regency Government's Receipts, in 2011-2012
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	17,29	15,93
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	10,88	9,57
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	2,53	2,33
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,84	0,84
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	3,03	3,19
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	57,49	66,33
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	6,05	5,02
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	48,19	57,53
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	3,25	3,78
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	25,23	17,73
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 5.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2012 / Percentage of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2011-2012
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	69,11	71,73
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	60,74	62,30
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0,00	0,01
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	2,88	2,04
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	2,36	4,04
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	1,54	1,56
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	1,55	1,52
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0,04	0,25
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	30,89	28,27
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	6,59	5,32
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	16,79	13,88
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	7,52	9,07
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 / Realization of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	951.681.434	899.626.131
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	228.870.562	241.190.745
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	500.613.750	575.131.711
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	222.197.122	83.303.675
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	932.018.512	902.295.612
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	608.011.246	537.766.497
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	324.007.266	364.529.115
	Surplus / (Defisit)	19.662.922	(2.669.481)
	Pembiayaan Netto / Cost	75.782.482	34.760.947

*) Data APBD

Tabel/Table 6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 / Realization of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2011-2012

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	228.870.562	241.190.745
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	120.457.516	142.003.279
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	34.408.439	32.075.528
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	10.121.340	10.121.340
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	63.883.267	56.990.598
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	500.613.750	575.131.711
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	62.722.029	32.179.747
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	436.129.821	536.466.614
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	1.761.900	6.485.350
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	222.197.122	83.303.675
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	951.681.434	899.626.131

*) Data APBD

**Tabel/Table 6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 /
Realization of Yogyakarta City Government's Expenditures, in
2011-2012**

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	608.011.246	537.766.497
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	515.295.853	488.062.869
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	235.379	118.866
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	59.495.648	31.153.412
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	31.531.674	11.872.590
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0	0
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0	2.719.828
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	1.452.692	3.838.932
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	324.007.266	364.529.115
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	92.851.601	97.184.630
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	172.004.552	184.372.486
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	59.151.113	82.971.999
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	932.018.512	902.295.612

*) Data APBD

Tabel/Table 6.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 / Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2011-2012 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	24,05	26,81
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	52,60	63,93
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	23,35	9,26
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	65,24	59,60
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	34,76	40,40

*) Data APBD

Tabel/Table 6.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 / Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2011-2012

(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	24,05	26,81
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	12,66	15,78
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	3,62	3,57
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	1,06	1,13
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	6,71	6,33
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	52,60	63,93
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	6,59	3,58
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	45,83	59,63
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	0,19	0,72
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	23,35	9,26
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,0

*) Data APBD

Tabel/Table 6.6 Persentase Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 / Percentage of Yogyakarta City Government's Expenditures, in 2011-2012
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	65,24	59,60
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	55,29	54,09
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	0,03	0,01
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	6,38	3,45
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	3,38	1,32
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	0,00	0,30
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	0,16	0,43
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	34,76	40,40
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	9,96	10,77
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	18,46	20,43
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	6,35	9,20
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183

Telp.: (0274)4342234, fax.:(0274)4342230

Homepage:<http://yogyakarta.bps.go.id>, e-mail:bps3400@bps.go.id